

ABSTRAK

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pati yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 menjadi tujuan penelitian ini, tulisan ini dimulai dari menggambarkan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014, berupa: (a) hal yang belum terlaksana, (b) hal yang tidak sesuai yang direncanakan. (c) kendala yang terjadi saat proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 dan (d) upaya upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pati dalam menghadapi atau menangani Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pati.

Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Subjek penelitian terdiri dari Ibu Endang Sulistiyani, SH., MH. selaku Kabid Penindakan Satpol PP Kabupaten Pati, Bapak Riyoso, S.Sos., MM. selaku Kepala Disdagperin Kabupaten Pati, Bapak Hendro selaku Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima Kabupaten Pati serta PKL di Jl. Pemuda dan P.Sudirman Kabupaten Pati. Teknik keabsahan data yang digunakan peneliti adalah diskriptif analisis.

Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa, (1) Banyak Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pati yang berjualan di badan-badan jalan, dan fasilitas umum yang bukan semestinya dan tidak tertata dengan rapi dan teratur, (2) Masih banyaknya Pedagang Kaki Lima yang tidak mengerti dan memahami Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, (3) Bersikerasnya PKL untuk tetap melakukan kegiatan usahanya pada tempat yang dilarang, (4) Minimnya lahan relokasi dan lokasi relokasi yang kurang strategis untuk pedagang kaki lima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten pati dalam mengatasi atau menangani kendala-kendala dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kabupaten Pati diantaranya, (1) Memberikan lokasi usaha yang strategis bagi Pedagang Kaki Lima agar tertata dengan rapi, (2) Penyediaan tempat untuk Pedagang Kaki Lima yang nyaman serta dukungan infrastruktur berupa wahan bermain dan tempat ibadah maupun lain-lain guna mendukung minat pengunjung ke tempat relokasi, (3) Memberikan penyuluhan dan pembinaan berupa sosialisasi kepada Pedagang Kaki Lima agar paham dan mengerti mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Kata kunci : *implmentasi, kebijakan publik, pedagang kaki lima(PKL)*

ABSTRACT

Structuring and Empowering Street Vendors in Pati Regency which is based on the Pati Regency Regional Regulation Number 13 of 2014 is the purpose of this study, this paper starts from describing the implementation of the Pati Regency Regional Regulation Number 13 of 2014, in the form of: (a) things that have not been implemented, (b) things are not as planned. (c) obstacles that occurred during the implementation process of Pati Regency Regional Regulation Number 13 of 2014 and (d) efforts made by the Pati Regency Government in dealing with or dealing with the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in Pati Regency.

This research is in the form of descriptive qualitative research, using a sociological juridical approach. The research subjects consisted of Mrs. Endang Sulistiyani, SH., MH. as the Head of the Satpol PP Enforcement of Pati Regency, Mr. Riyoso, S.Sos., MM. As the Head of the Pati Regency Disdagperin, Mr. Hendro as the Chairperson of the Pati Regency Street Vendor Association and street vendors on Jl. Youth and P. Sudirman, Pati Regency. The data validity technique used by the researcher is descriptive analysis.

The results of this study found that, (1) Many street vendors in Pati Regency who sell on roads, and public facilities are not proper and are not neatly arranged and orderly, (2) there are still many street vendors who do not understand and understand the Pati Regency Regional Regulation Number 13 of 2014 concerning Structuring and Empowering Street Vendors, (3) Insisting on street vendors to continue to carry out their business activities in prohibited places, (4) Lack of relocation land and less strategic relocation locations for street vendors from the Government Pati regency.

Efforts made by the district government of pati in overcoming or dealing with obstacles in the arrangement and empowerment of street vendors in Pati regency include, (1) Providing strategic business locations for street vendors so that they are neatly organized, (2) Provision of places for street vendors. comfort and infrastructure support in the form of playgrounds and places of worship and others to support the interest of visitors to relocation places, (3) Provide counseling and guidance in the form of socialization to street vendors to understand and understand the Regional Regulation of Pati Regency Number 13 of 2014 concerning Arrangement and Empowerment of Street Vendors.

Keywords: *implementation, public policy, street vendors (PKL)*